

AGAMA SEBAGAI DASAR PENGUASAAN MANUSIA ATAS DIRINYA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PERDAMAIAN DUNIA

Oleh Prof Dr. H.A. Mukti Ali

Uraian ini bukan merupakan pembahasan terhadap prasaran Bapak Menteri Munawir Sjadzali. Saya sangat setuju dengan prasaran beliau itu. Uraian ini --kalau bisa-- dimaksudkan untuk menambah uraian Bapak Menteri.

I

Kain dan Habel (*Kejadian*) atau Qabil dan Habil (*Al Qur'an*), kedua anak Nabi Adam, bertengkar karena urusan persembahan kurban kepada Tuhannya. Karena pertengkaran itu maka Qabil (Kain) membunuh adiknya, Habil.

Agama telah ada dalam waktu itu, karena esensi agama adalah percaya kepada Yang Supra-Alami dan berusaha untuk berbakti kepada-Nya. Tetapi dalam waktu yang sama pembunuhan atau perang-pun telah terjadi.

Memang "perdamaian" adalah bukan hanya "tidak adanya perang", tetapi "perang" adalah bentuk ekstrim dari "tidak adanya perdamaian".

Sejak permulaan sejarah "perdamaian" telah dianggap sebagai "kurnia" dan "rahmat", dan sebaliknya "perang" sebagai "malapetaka" dan "azab". Namun baru sejak akhir abad pertengahan ahli-ahli filsafat dan negarawan dengan sistematis merenungkan masalah perdamaian. Usaha untuk meletakkan perdamaian pada dasar yang kuat dalam skala dunia dengan tindakan-tindakan politis baru dimulai pada permulaan abad ke-19.

Gerakan perdamaian, baik secara spekulatif maupun secara praktis, telah didorong oleh kericuhan-kericuhan *politik*, yang membuktikan tentang mendesaknya keperluan untuk adanya kemantapan perdamaian dunia itu. Orang lalu mulai memikirkan tentang bentuk-bentuk baru dari organisasi internasional setelah timbulnya negara-negara berteritorial yang melucuti imperium Romawi dari fungsi-fungsi politiknya sebagai organisasi internasional dunia Kristen.

Manakah pengganti untuk kesatuan politik yang sudah hilang yang sekalipun sedikit dapat menjaga perdamaian dan tata tertib dunia itu? Pertanyaan ini diajukan oleh Erasmus dalam abad ke-16, oleh Sully, Éméric Crucé, Hugo Grotius, dan William Penn pada abad ke-17 dan oleh Abbé de St. Pierre, Rousseau, Bentham, dan Kant pada abad ke-18.

Tanggapan terhadap prasaran Bapak Menteri Agama RI H. Munawir Sjadzali, Seminar Polemologi, dalam rangka menyongsong Peringatan Dies Natalis yang ke-34 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tanggal 14-15 Desember 1983.

Jawaban mereka biasanya berputar sekitar hukum internasional atau organisasi internasional yang didasarkan pada hukum internasional itu.

Upaya-upaya politik dalam abad modern untuk menegakkan perdamaian dunia sebenarnya telah mulai sejak dari pengalaman perang-perang Napoleon. Pengalaman itu berdampak ganda dalam susunan dunia internasional dalam abad modern ini.

Perang-perang Napoleon telah menghancurkan imbalan kekuatan yang sejak akhir abad pertengahan menjadi dasar bagi perdamaian dan tata tertib internasional dan menggantinya dengan imperium universal, yang bisa juga dapat menjamin perdamaian untuk sementara waktu, namun hakekatnya menghancurkan kebebasan untuk selama-lamanya.

Perang-perang Napoleon juga membawa munculnya ide nasionalisme yang menghancurkan susunan dinasti lama, tetapi dalam waktu yang sama juga menimbulkan pelbagai krisis internasional dan peperangan yang tidak ada henti-hentinya.

Analoog dengan itu adalah apa yang terjadi dalam dunia Islam. Pusat rohani dunia Islam adalah Makkah dan Madinah. Tetapi solidaritas Islam dalam bidang politik tercermin dalam pembentukan kekhalifahan. Setelah jatuhnya Baghdad dalam abad ke-13, yang dianggap suatu kekhalifahan yang meliputi dunia Islam pada waktu itu, maka kekhalifahan-kekhalifahan Islam terbentuk di pelbagai tempat dengan skala benua, baik di Eropa maupun di Asia.

Kekhalifahan yang memusat itu rupa-rupanya sangat mempengaruhi alam pikiran Muhammad As Sanusi di Afrika Utara dan Jamaluddin Al Afghani di Timur yang ingin menghimpun potensi Islam yang terserak-serak, selain untuk menjamin perdamaian ke dalam juga untuk menentang penjajahan dari luar. Gerakan itulah yang di Barat terkenal dengan Pan Islamisme. Tetapi Pan Islamisme pada permulaan abad ke-20 menjelma menjadi gerakan nasionalisme yang membuahkan kemerdekaan bagi negerinegeri Islam, tetapi dalam waktu yang sama juga menimbulkan pertentangan dan intrik yang tidak ada henti-hentinya di kalangan mereka sendiri.

Lalu pada akhir abad ke-20 ini, untuk menghimpun kekuatan dunia Islam, berdirilah Rabitah Al Alam Al Islami yang berpusat di Makkah---yang sebelumnya telah didahului oleh Muktamar Al Alam Al Islami yang dulu berpusat di Baitul Makdis, tetapi kini di Karachi--- dan Islamic Conference yang berpusat di Jeddah.

Disamping faktor-faktor politis yang mendorong usaha untuk memecahkan masalah perdamaian dunia, tiga faktor lain saya rasa perlu ditambahkan di sini, yaitu spiritual, moral dan intelektual.

Sejak zaman Stoa dan permulaan Kristen, terdapatlah rasa kesatuan *spiritual* pada dunia Barat yang untuk mewujudkannya diperlukan organisasi

politik yang memadai. Dalam waktu itu imperium Romawi adalah merupakan organisasi politik yang diperlukan dalam skala semesta. Sepanjang sejarah dunia Barat, imperium Romawi merupakan simbol kesatuan spiritual, yang memberikan ilham kepada Charlemagne dan tidak kurang pula kepada Napoleon, dan yang sepanjang abad pertengahan memberikan pengabsahan yang mutlak bagi tindak laku politik imperium Romawi dan Kepausan. Dengan itu maka tidak mengherankan bahwa dalam waktu imperium Romawi terpecah belah pada tahun 1806, Napoleon berusaha untuk membangkitkan kembali; dan satu dekade kemudian usaha-usaha praktis telah dimulai untuk memperoleh pengganti tata tertib internasional yang dulu pernah diberikan imperium Romawi.

Akar *moral* dari usaha-usaha untuk memperoleh dasar yang kuat bagi perdamaian dunia harus dicari dari makin meningkatnya kesadaran manusiawi dan tingkah laku yang dianggap beradab, yang perwujudannya dapat ditemukan pada pembaharuan-pembaharuan besar dalam bidang politik dan sosial pada abad ke-19 dan pada abad ke-20.

Agama, filsafat zaman pencerahan dan teori politik liberalisme menghargai kehidupan manusia dan peningkatan kesejahteraannya. Untuk memperluas kedaulatan hukum, perdamaian dan ketertiban sejak dari tingkat nasional sampai tingkat internasional adalah merupakan usaha-usaha logis dari paham-paham itu.

Faktor *intelektual* yang mendasari usaha untuk memperoleh perdamaian adalah timbulnya semangat dagang dan ilmu pada abad ke-18 dan ke-19. Sesuai dengan semangat itu maka perang merupakan gangguan irrasional pada tata tertib yang rasional. Menurut Kant, "Jiwa dagang tidak bisa berdampingan dengan perang". Demikian juga Herbert Spencer yakin bahwa perang adalah sudah ketinggalan zaman dalam masyarakat industri. Jadi adalah diyakini secara luas bahwa perdamaian abadi dalam dunia internasional bisa ditegakkan dengan perantaraan usaha-usaha rasional, yaitu dagang dan ilmu, yang membawa keuntungan besar bagi umat manusia dalam lapangan-lapangan lain.

Konvergensi dari empat faktor di atas, yaitu faktor-faktor: politik, spiritual, moral dan intelektual, pada permulaan abad ke-19 telah menimbulkan prakarsa untuk usaha-usaha praktis untuk mencari perdamaian sebagai ganti perang. Usaha untuk mencari perdamaian abadi ini telah dilakukan dengan tiga cara: (1) membatasi kecenderungan-kecenderungan yang destruktif dan anarkis dalam politik internasional; (2) transformasi politik internasional dengan menghilangkan sama sekali kecenderungan-kecenderungan yang destruktif dan anarkis; dan (3) memberikan tempat kepada atau menampung berbagai macam kepentingan yang beragam dengan mengesampingkan kecenderungan-kecenderungan politik internasional yang destruktif dan anarkis.

II

Untuk menegakkan perdamaian, beberapa cara telah diusahakan, yaitu : perlucutan senjata, jasa-jasa hukum, perubahan dengan damai dan pemerintahan internasional. Perdamaian dengan perantara transformasi dilakukan dengan usaha menegakkan negara dunia. Sedangkan diplomasi dipergunakan untuk mencapai perdamaian dengan perantara saling memberi dan menerima.

Perlucutan senjata adalah pengurangan atau penghilangan jenis senjata-senjata tertentu atau semuanya untuk mencegah perlombaan senjata. Ada dua perbedaan yang harus kita ingat, yaitu : antara perlucutan senjata secara umum dan lokal, dan perlucutan senjata secara kuantitatif dan kualitatif.

Perlucutan senjata umum adalah perlucutan senjata yang diikuti oleh semua bangsa yang bersangkutan, sedang perlucutan senjata lokal adalah perlucutan senjata yang hanya melibatkan beberapa negara saja.

Perlucutan senjata kuantitatif menggambarkan pengurangan menyeluruh terhadap segala macam tipe senjata. Seding perlucutan senjata kualitatif bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan tipe-tipe senjata tertentu, umpamanya senjata nuklir.

Rupanya sebagian besar usaha untuk memperoleh perdamaian internasional dengan perantara perlucutan senjata itu gagal. Memang perlombaan senjata merupakan simptom dari konflik-konflik politik yang membawa kepada perang, dan perlucutan senjata merupakan simptom dari hilangnya ketegangan politik itu yang akan membawa kepada perdamaian. Diplomasi sendiri rupa-rupanya tidak bisa memberikan jaminan berhasilnya perlucutan senjata itu. Paling banter diplomasi bisa mengubah cara-cara yang digunakan oleh perang, tetapi bukan perang itu sendiri.

Keamanan bersama diusahakan dengan perhitungan bahwa pada umumnya bangsa-bangsa menimbun senjata dan mempergunakannya untuk perang disebabkan karena mereka takut agresi dari luar, atau karena mereka yakin bahwa dengan melakukan agresi itu tujuannya akan tercapai tanpa risiko terlalu besar. Dengan itu maka apabila bangsa-bangsa dapat menciptakan keamanan bersama maka dorongan utama untuk berperang akan hilang. Dalam sistem keamanan bersama, keamanan merupakan kepentingan bagi semua bangsa yang akan mereka usahakan bersama, seolah-olah keamanannya sendiri terancam.

Kemampuan sistem keamanan bersama untuk memelihara perdamaian tergantung pada tiga hal : (1) sistem kolektif itu setiap waktu harus mempunyai kekuatan yang memadai untuk menakut-nakuti setiap agresi yang potensial; (2) bangsa-bangsa yang mempunyai kekuatan yang memadai itu harus mempunyai perhatian yang sama dalam mempertahankan status

quo; (3) bangsa-bangsa itu harus mengalahkan konflik-konflik kepentingan politiknya kepada kepentingan umum untuk keamanan bersama.

Sejarah keamanan bersama sebagaimana yang telah diberikan oleh Konvensi Liga Bangsa Bangsa dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa menunjukkan bahwa tiga syarat sebagaimana tersebut di atas jarang sekali terdapat dalam waktu yang sama. Pertama-tama sejarah telah membuktikan bahwa agresi itu pada umumnya dilakukan tidak oleh satu tetapi oleh beberapa negara yang pada permulaannya paling sedikit mempunyai kekuatan yang sama atau melebihi negara-negara yang melawan agresi itu. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa apa yang diperlukan untuk keamanan bagi satu kelompok bangsa bisa juga tidak sesuai, atau bahkan betul-betul mengancam keamanan kelompok lain. Selain itu sebenarnya keamanan bersama memerlukan transformasi moral yang menjadikan bangsa-bangsa sanggup menekan kepentingan nasionalnya sendiri, dan politik nasionalnya dipergunakan untuk politik bersama guna mencapai tujuan-tujuan supra-nasional.

Jasa-jasa hukum dipergunakan sebagai alat untuk memelihara perdamaian dengan perhitungan bahwa pertikaian-pertikaian internasional telah menyebabkan perang karena tidak adanya fasilitas bagi bangsa-bangsa untuk menyelesaikan konflik di antara mereka secara damai.

Jadi selama separuh akhir abad ke-19 gerakan arbitrase memperoleh dorongan yang kuat untuk memprakarsai berdirinya mahkamah-mahkamah arbitrase internasional dengan kewenangan untuk menyelesaikan konflik-konflik internasional. Banyak negara satu sama lain saling mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tertentu di antara mereka. Gerakan itu bermuara pada berdirinya Permanent Court of Arbitration, Permanent Court of International Justice dan International Court of Justice.

Tetapi sebenarnya pertentangan-pertentangan yang diselesaikan oleh mahkamah-mahkamah internasional itu, andaikata tidak dapat diselesaikan, secara potensial tidak akan berakibat timbulnya perang.

Perubahan dengan damai adalah usaha yang ditimbulkan karena lumpuhnya jasa-jasa hukum untuk menyelesaikan konflik-konflik dengan damai. Usaha ini mengarah ke penyelesaian secara transformasi dan bukan dengan sarana hukum. Masyarakat terutama dalam negara-negara demokrasi selalu mengalami proses perubahan dengan damai. Proses itu bisa terjadi karena tiga faktor: (1) kemampuan berbagai kecenderungan pendapat umum untuk melahirkan pendapat secara bebas dan berlomba satu sama lain untuk mempertahankan atau mengubah status quo; (2) kemampuan lembaga-lembaga sosial dan politik untuk menyerap tekanan pendapat umum dan dijadikan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru; dan (3) kemampuan negara

untuk menjaga supaya akibat-akibat tekanan sosial yang saling berebut itu tidak menjadi perubahan dengan kekerasan.

Faktor-faktor ini bisa dikatakan sama sekali tidak ada dalam dunia internasional. Lembaga-lembaga sosial dan politik internasional adalah demikian lemah. Apa lagi untuk melaksanakan suatu keputusan yang diambil dengan suara mayoritas, yang seharusnya mengikat pada kelompok minoritas, tidaklah begitu mudah karena dibatasi oleh kedaulatan suatu negara. Demikian juga tidak ada organisasi supra-nasional yang dapat memaksa yang tidak didasarkan pada kerja sama antara negara-negara anggotanya secara suka rela.

Akibatnya maka usaha-usaha yang diprakarsai oleh Liga Bangsa Bangsa dan juga oleh Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memungkinkan perubahan dengan damai terbukti tidak efektif. Perubahan secara damai atas usaha organisasi internasional sering kali berlawanan dengan kedaulatan sesuatu bangsa. Dan lebih daripada itu konflik bisa diselesaikan dengan perubahan damai jika diterima oleh pihak-pihak yang bertikai.

Pemerintahan internasional adalah usaha lain untuk memperoleh perdamaian. Cara-cara yang disebutkan sebelum ini berusaha untuk menggunakan cara tertentu untuk suatu konflik tertentu pula, sedang pemerintahan internasional menyadari bahwa perdamaian dan tata tertib dapat diperoleh hanya dalam masyarakat yang utuh yang ada di bawah otoritas bersama dan konsepsi keadilan yang sama pula. Dengan itu maka pemerintahan internasional adalah usaha untuk menegakkan otoritas bersama dan untuk menciptakan konsepsi keadilan yang sama dalam suatu masyarakat negara-negara berdaulat. Usaha itu lahir setelah usainya tiga perang besar pada abad ke-19 dan separuh pertama abad ke-20. Perang-perang Napoleon mendorong lahirnya aliansi Kristen. Perang Dunia I menimbulkan Liga Bangsa Bangsa dan Perang Dunia II menimbulkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi-organisasi internasional itu tidak ada yang sanggup meletakkan perdamaian internasional pada dasar yang lebih kokoh, karena kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pemerintahan internasional itu sendiri.

Aliansi Kristen, Liga Bangsa Bangsa dan Perserikatan Bangsa Bangsa dianggap sebagai pemerintahan internasional bagi negara-negara besar. Hal ini dapat dimengerti dilihat dari keanggotaan Aliansi Kristen tersebut, juga dari keanggotaan dan fungsi Dewan dari Liga Bangsa Bangsa dan Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Dengan itu maka kemampuan organisasi-organisasi internasional itu untuk memelihara perdamaian dunia tergantung pada kemampuan negara-negara besar itu untuk bekerja dalam kesatuan untuk mencapai tujuan perdamaian itu. Namun kenyataannya pada kesemua tiga organisasi itu, kepentingan khusus dari negara-negara besar itu sendiri melebihi kepentingan umum yang harus mereka bela bersama, yaitu memelihara perdamaian.

Sebenarnya ketiga organisasi itu mempunyai tujuan politik yang pokok, yaitu ingin mempertahankan status quo sebagai akibat dari perang sebelumnya. Namun tidak semua bangsa-bangsa yang besar itu mempunyai pengertian yang sama dalam mempertahankan status quo itu mengingat kepentingan negara mereka masing-masing. Bahkan mereka sebenarnya tidak mempunyai persepsi yang sama dalam mempertahankan status quo itu.

Dengan itu maka kegunaan bahkan eksistensi Aliansi Kristen dihancurkan oleh konflik antara Inggris Raya dan Rusia yang terjadi sepanjang abad ke-19. Sedang kemampuan Liga Bangsa Bangsa untuk menjadi alat yang efektif untuk memelihara perdamaian dirusak oleh konflik politik antara Inggris Raya dan Prancis, lalu antara Prancis dan Jerman, kemudian akhirnya antara Inggris Raya dan Prancis di satu pihak dan Uni Soviet di lain pihak. Adapun Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai badan pendamai dilumpuhkan sejak permulaan berdirinya oleh konflik antara dunia Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Dengan itu maka usaha untuk memperoleh perdamaian dengan pemerintahan internasional dari negara-negara berdaulat rupa-rupanya menjadi korban dari kontradiksi yang ada dalam dirinya sendiri. Mendirikan pemerintahan internasional yang efektif dari negara-negara berdaulat rupa-rupanya merupakan kontradiksi dengan adanya kedaulatan negara-negara itu sendiri.

Lalu orang memikirkan tentang kemungkinan pembentukan *Negara Dunia* sebagai usaha untuk memelihara perdamaian. Alasannya adalah bila perdamaian suatu negeri itu dapat kuat jika pemerintahan-pemerintahan setempat dan regional bersedia berada di bawah otoritas bersama, maka perdamaian internasional dapatnya diperoleh jika diletakkan atas dasar suatu pemerintahan untuk semua umat manusia dimana pemerintahan nasional harus menyerahkan kedaulatannya.

Pemerintahan dunia apapun wujudnya, apabila bukan merupakan pemerintahan tirani, harus berdiri di atas tiga dasar : loyalitas supra-nasional, mengharapkan adanya keadilan, dan kekuatan yang memadai. Ini berarti bahwa apabila timbul konflik antara loyalitas terhadap suatu bangsa dan loyalitas terhadap pemerintahan dunia, maka pemerintahan dunia itu harus yakin bahwa konflik itu akan diselesaikan bagi keuntungannya. Lebih daripada itu rakyat dunia ini harus bersatu dalam harapannya bahwa pemerintahan dunia itu paling tidak akan berlaku adil dalam perlakuannya terhadap mereka. Akhirnya pemerintahan dunia harus memiliki kekuatan fisik yang memadai hingga dengan demikian tidak ada kelompok bangsa di bawah yurisdiksinya secara fisik berani menentang keputusan-keputusannya.

Untuk mewujudkan tiga prakondisi untuk menciptakan negara dunia yang diharapkan sanggup memelihara perdamaian itu, dua cara dapat dipergunakan, yaitu konstitusional dan fungsional. Beberapa organisasi telah memikirkan pembuatan konstitusi untuk membentuk negara dunia yang umumnya berbentuk federal. Apabila konstitusi itu bisa diwujudkan dan disetujui oleh wakil-wakil dari bangsa-bangsa di dunia ini, maka pelaksanaannya memerlukan tiga dasar bagi berdirinya negara dunia itu sebagaimana tersebut di atas. Sebaliknya ada orang-orang yang berpendapat bahwa sebelum negara dunia dapat diwujudkan maka umat manusia harus belajar lebih dahulu mengalami penyatuan kepentingan mereka bersama dan mengembangkan dasar-dasar negara dunia dengan perantaraan kerja sama yang aktif untuk tujuan-tujuan terbatas.

Sekali umat manusia belajar bekerja sama, umpamanya untuk meningkatkan kesehatan atau produksi pertanian bersama, tanpa mengingat batas negeri masing-masing, maka dapat diharapkan bahwa pandangan kesatuan politiknya berangsur-angsur tumbuh dengan baik. Namun pendekatan secara fungsional itu banyak tergantung pada badan-badan khusus dari Perserikatan Bangsa Bangsa dan organisasi-organisasi semacam itu.

Kita mengetahui betapa lemahnya organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa itu.

Namun demikian *diplomasi* masih merupakan alat yang pokok yang dipergunakan oleh negara-negara untuk memelihara perdamaian dunia dengan jalan mendamaikan berbagai macam kepentingan yang saling berbeda yang membawa kepada perang. Diplomasi adalah merupakan cara yang paling tua, dan bahkan yang paling alami untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan internasional, karena negara-negara yang berdaulat yang tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang menguasainya, sudah barang tentu harus berusaha menyelesaikan perbedaan di antara mereka dengan cara damai dengan jalan perundingan, yaitu perantaraan diplomasi. Faktor yang menentukan suksesnya perundingan diplomatik semacam ini adalah kepentingan pihak-pihak yang berunding. Kepentingan itu biasanya mengambil dua bentuk. Di satu pihak, pihak-pihak yang berunding mengharapkan penyelesaian secara damai itu dapat dicapai perlindungan dan peningkatan kepentingan-kepentingan mereka yang vital, sedang kedua-duanya mau memberikan kompromi pada soal-soal yang tidak begitu penting. Dengan itu maka tiap pihak yang berunding memberikan sesuatu dan menerima sesuatu. Sebaliknya kepentingan pihak-pihak dalam mengikat perjanjian dan terutama kesediaannya untuk melaksanakannya tergantung pada tekanan-tekanan politik dan militer yang satu pihak dapat menekan kepada pihak yang lain untuk mendorong penyelesaian secara damai. Ini adalah salah satu fungsi dari perlombaan senjata, aliansi-aliansi dan perimbangan kekuatan.

Sayangnya Perserikatan Bangsa Bangsa yang seharusnya menjadi ganti

bagi wadah dan cara-cara tradisional bagi diplomasi telah berubah menjadi alat diplomasi yang dipergunakan negara-negara besar untuk melindungi kepentingan-kepentingan khusus mereka.

Sungguhpun demikian usaha untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk mempertahankan perdamaian lebih daripada cara diplomasi, yang makin menyita perhatian umat manusia sejak permulaan abad ke-19, menggambarkan betapa pentingnya masalah perdamaian itu. Karena revolusi politik, teknik dan moral telah merubah perang dari alat bagi politik luar negeri menjadi alat penghancur alam semesta. Memang adalah salah satu paradoks yang paling besar dalam abad ke-20 ini bahwa di satu pihak memelihara perdamaian itu merupakan penyelamatan terhadap peradaban umat manusia, tetapi kenyataannya alat-alat yang tradisional untuk melindunginya menjadi makin hari makin tidak efektif. Dan alat-alat penyelamat perdamaian yang baru belum ditemukan orang.

III

Pada uraian yang lalu kita mengetahui betapa faktor-faktor spiritual dan moral, disamping faktor-faktor politik dan intelektual, ikut melandasi usaha orang untuk memperoleh perdamaian. Sekarang kita mencoba melihat apa yang dilakukan oleh umat beragama dalam usaha mereka untuk mencapai perdamaian.

Memperhatikan alam pikiran umat beragama setelah Perang Dunia II kita mengetahui ada dua kecenderungan terdapat pada agama-agama besar di dunia ini, ialah *ekumenisme* (persatuan ke dalam) dan *konsultasi* (kerukunan ke luar).

Ekumenisme adalah suatu gerakan yang berusaha mendekatkan berbagai macam aliran dalam suatu agama ke dalam satu wadah (persatuan ke dalam). Sebenarnya pemikiran-pemikiran ke arah itu (ekumenisme) sudah mulai sejak sebelum Perang Dunia II.

Tentang *agama Hindu*, karena struktur ajarannya yang mengakui adanya kasta, maka hingga sekarang-pun belum berhasil mendirikan gerakan ekumenisme itu. Tetapi pembaharuan dalam pemikiran-pemikiran agama Hindu sudah lama dilakukan.

Saya kira agama Hindu masih memerlukan waktu agak lama untuk dapat mendirikan gerakan ekumenisme itu.

Adapun tentang *agama Budha*, maka pada akhir abad yang lampau telah diselenggarakan pertemuan agama Budha di Burma yang merupakan titik permulaan kebangkitan kembali agama Budha. Tetapi demonstrasi yang hebat tentang kebangkitan kembali agama Budha itu ditandai dengan diadakannya pertemuan kaum Budhis di Rangoon tahun 1954. Bersamaan dengan pertemuan itu telah didirikan sebuah pagoda dengan nama "Pagoda

Perdamaian Dunia". Mereka menganggap bahwa agama Budha adalah satu-satunya agama yang membawa berita bagi keselamatan dunia.

Pada tahun 1956 The World Fellowship of Buddhist telah mengadakan kongresnya, yang di antara lain-lain mengambil resolusi-resolusi yang berhubungan dengan kegelisahan-kegelisahan di dunia ini akibat ketegangan-ketegangan di Timur Tengah.

Adapun tentang *agama Kristen*, maka gerakan ekumenisme itu nampak dengan terbentuknya Dewan Gereja-Gereja Sedunia yang berpusat di Swiss, yang usaha-usahanya sangat luas.

Adapun *agama Katholik*, maka umatnya dihimpun di bawah pimpinan Vatikan.

Usaha dalam lingkungan *agama Islam*, orang mengetahui Rabitah Al Alam Al Islami yang berpusat di Makkah. Organisasi ini menghimpun kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi Islam swasta seluruh dunia yang kini usahanya makin hari makin luas.

Dalam tingkatan pemerintahan terdapat Islamic Conference yang berusaha mempererat hubungan antar negara-negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, terutama dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya.

Di samping usaha-usaha umat beragama untuk menyatukan umatnya (ekumenisme), *konsultasi* keluar pun kini merupakan usaha bersama umat beragama.

Umat beragama sadar bahwa dewasa ini menciptakan "masyarakat dunia" sebagai buah dari perdamaian adalah suatu keharusan. Para negarawan, ahli filsafat dan ahli agama, dengan tiada kecualinya, menginginkan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk menciptakan masyarakat dunia yang hingga kini belum tercipta.

Konsepsi tentang nasionalisme sempit yang pada permulaan abad ke-20 merupakan dorongan yang hebat sekali untuk mengadakan perubahan dari negeri jajahan menjadi negeri merdeka, terutama di Asia dan Afrika, adalah hanya merupakan tujuan-antar dan bukan merupakan tujuan akhir. Orang mulai memahami bahwa konsep itu ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dunia dewasa ini.

Kita menyadari bahwa untuk menghadapi masalah dunia yang beraneka ragam itu, tiap negeri bergantung pada lainnya. Negeri-negeri itu satu sama lain saling membutuhkan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan dan sebagainya.

Selain dari itu, umat beragama sadar bahwa mereka hidup dalam dunia yang serba ganda. Dunia makin ciut tetapi makin beraneka. Persoalan kita dewasa ini ialah bagaimana supaya kita bisa hidup bersama bukan

hanya dalam perdamaian, tetapi juga dalam suasana saling percaya mempercayai dan setia satu terhadap yang lain. Ini berarti bahwa kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar supaya orang lain percaya kepada kita, sebagaimana kita dapat memahami dan menghargai mereka. Kita harus berusaha untuk menciptakan situasi yang memungkinkan kita dapat menghormati nilai-nilai yang dihormati orang lain, dengan tidak usah meninggalkan nilai-nilai yang kita junjung tinggi sendiri. Untuk itulah maka umat beragama lalu mengadakan *dialog*.

Dewan Gereja-Gereja Sedunia telah memprakarsai dialog-dialog, baik bilateral Kristen-Islam maupun multilateral yang dihadiri banyak agama, antara tahun 1969-1976, di Cartigny, Ajaltoun, Broumana, Colombo, Legon, Hongkong dan Chambesy; Dalam pertemuan-pertemuan itu utusan dari Vatikan juga diundang.

Sementara itu Vatikan dan Islam juga mengambil inisiatif untuk mengadakan dialog di Tripoli (1976). Selain dari itu dialog-dialog yang diprakarsai oleh Islam dan Kristen diadakan di Cordoba (1974), Tunis (1974) dan Cairo (1975). Beberapa kali dialog Kristen-Islam juga diadakan di Filipina Selatan sejak tahun 1974. Kunjungan Rabitah Al Alam Al Islami ke Geneva dan Roma (1974) adalah sangat penting artinya dalam rangka usaha dialog antara Islam dan Kristen.

Selain dari itu dalam pertemuan Dewan Gereja-Gereja Sedunia di Nairobi (1975) juga diundang pemimpin dan perutusan organisasi Islam. Demikian juga pertemuan-pertemuan Islam juga mengundang perutusan Kristen, umpamanya Konperensi Puncak Islam di Lahore (1974) dan juga Konperensi Puncak Islam di Thaif (1981).

Rasanya tidak perlu diterangkan bahwa dialog-dialog antara umat beragama, baik secara bilateral maupun multilateral, dimaksudkan untuk menegakkan perdamaian dunia lewat agama.

Satu hal perlu dicatat, bahwa hingga kini dialog bilateral Islam-Yahudi belum pernah diadakan, Adapun dalam dialog multilateral, Yahudi juga diundang.

Pada akhir tahun 1967 Paus Paulus VI telah menganjurkan kepada umat Katholik juga kepada umat agama-agama lain dan seluruh umat manusia yang mempunyai tujuan baik supaya merayakan tanggal 1 Januari 1968, dan seterusnya untuk setiap tahun, sebagai "Hari Perdamaian". Paus menganggap bahwa anjuran itu adalah merupakan perwujudan aspirasi umat manusia, pemerintahan-pemerintahan berbagai negeri, organisasi-organisasi internasional yang berusaha mempertahankan perdamaian dunia.

Pada tahun 1966 telah didirikan World Conference of Religions and Peace, yang tiap kali mengadakan kongresnya. Dan pada tahun 1970 berdirilah Congress of Religion for Peace yang aktif mengadakan pertemuan-

pertemuan dari pelbagai bagian dunia ini.

Dari namanya dapat diketahui bahwa kedua organisasi agama internasional itu berusaha untuk menegakkan perdamaian dengan perantara agama.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, orang dapat memahami betapa sulitnya menegakkan perdamaian itu, dan dalam waktu yang sama orang dapat mengetahui betapa kurang efektifnya cara dan badan-badan yang selama ini dipergunakan untuk mengusahakan terwujudnya perdamaian. Lalu timbul pertanyaan : apakah tidak lebih baik jika cara-cara dan badan-badan yang selama ini dipergunakan untuk mencapai perdamaian itu kita tinggalkan saja? Jawabannya tentu, tidak. Biarlah cara-cara dan badan-badan itu kita pergunakan, disamping kita mencari cara-cara lain untuk menegakkan perdamaian.

Pada akhirnya kita harus sadar bahwa perdamaian itu sebenarnya *bersumber dan berada pada dan dalam diri pribadi manusia itu sendiri*. Manusia harus kita didik untuk berlaku dan mencintai damai.

IV

Untuk menutup uraian ini, saya ingin mengajukan tiga buah pendapat :

1. Kalau tidak salah seminar yang membahas polemologi baru untuk pertama kali ini diadakan di Indonesia. Dan patutlah kalau yang mengadakan adalah Universitas Gajah Mada. Mengingat pentingnya polemologi, baik sebagai ilmu yang masih mencari bentuknya maupun inti dan hakekatnya yang harus kita hayati dan kita amalkan bersama, maka saya rasa adalah sangat baik bila di Universitas Gajah Mada ini *dengan pendekatan multi-disipliner diadakan pengkajian dan penelitian polemologi ini*.
2. Pelbagai macam usaha telah dilakukan untuk mencapai perdamaian itu, tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Jika mengikuti pendapat bahwa perdamaian itu letaknya pada diri manusia itu sendiri, maka pendapat saya yang kedua adalah hendaknya di Indonesia ini diadakan *pendidikan perdamaian*. Apa isi dan cara pelaksanaannya dapat dibicarakan kemudian.
3. Dengan tidak mengecilkan bahaya konflik-konflik senjata di pelbagai bagian dunia ini, maka saya ingin mengajukan suatu pendapat untuk membantu penyelesaian perang Israel—dunia Arab yang sudah berjalan tidak kurang dari satu generasi ini. Usaha-usaha untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah itu telah dilakukan dengan pelbagai macam cara dan alat : mesiu dan bedil, minyak dan bahan kimia, politik dan diplomasi, tetapi hasilnya adalah

darah dan air mata. Penderitaan terutama di kalangan bangsa Palestina makin menjadi-jadi.

Untuk hal ini apakah tidak lebih baik kalau dicoba untuk mengadakan dialog *Islam-Yahudi* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Dialog itu diadakan antara Islam dan Yahudi, diambilkan dari negara Arab dan Israel. Sengaja saya menyebut Yahudi, artinya bukan Zionisme. Dengan itu maka yang diundang untuk dialog itu adalah ahli agama Islam dan ahli agama Yahudi, jadi bukan politikus. Untuk supaya pembicaraan bisa intensif, maka dialog itu paling banyak dikunjungi oleh kurang lebih 20 orang : 10 orang Islam dan 10 orang Yahudi, sebagai individu. Jadi mereka datang tidak mewakili suatu organisasi atau negara. Adapun tempat penyelenggaraan dialog itu jangan di negara Arab dan tidak pula di negara Israel. Lebih baik diadakan di suatu negara yang netral umpamanya Swiss. Yang mengundang juga supaya pihak ketiga, jadi bukan kelompok Yahudi dan bukan pula Islam. Tetapi lebih baik barangkali Dewan Gereja-Gereja Sedunia yang berpusat di Geneva. kalau mau dimintai tolong. Adapun masalah-masalah yang dibicarakan dalam dialog itu adalah bukan masalah politik dan militer, juga bukan masalah Israel atau PLO, tetapi masalah-masalah yang berhubungan dengan agama. Jadi umpamanya : apakah konsepsi Tuhan menurut Yahudi dan Islam, konsepsi tentang manusia, dunia, perdamaian, baik buruk, pahala dosa, hidup setelah mati dan sebagainya. Tentu saja dialog itu bukan hanya diadakan sekali saja, tetapi berulang kali melihat kemungkinan yang ada. Maksud dialog itu adalah bukan untuk menyelesaikan masalah Israel-Palestina, tetapi memberikan dimensi lain dalam usaha penyelesaian persoalan Israel-Palestina.

Saya yakin bahwa akhirnya masalah Israel-Palestina pasti akan selesai, jika paling tidak dapat dicapai dua kesepakatan, yaitu : negara-negara Arab mengakui eksistensi Israel, sebagaimana Israel mengakui berdirinya negara Palestina dengan batas-batas negara yang disetujui bersama. Dan kedua adalah perjanjian ko-eksistensi damai dan saling tidak menyerang.

Masalah Palestina harus segera selesai, sebab makin lama makin merugikan negara-negara Arab dan Islam.

Disamping "Lobby Yahudi" yang merupakan alat yang sangat ampuh untuk melicinkan diplomasi Israel dalam forum-forum internasional, kini baik dalam negeri Israel maupun diluarnya tumbuh generasi Yahudi baru yang sudah emoh dan bosan dengan perang. Mereka ingin hidup damai dengan dunia sekitarnya. Phenomena ini tentu saja harus dimanfaatkan.

Dan penyelesaian masalah Palestina-Israel ini akan mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap perdamaian dunia yang kita dambakan bersama ini.

Catatan : Untuk menyusun uraian ini buku-buku di bawah ini banyak
dinukil : 1. Juergen Deding, *Recent Advances in Peace and
Conflict Research*, London,
California, 1976.

2. H. J. Mu, art. "Piece", *Encyclopaedia Britanica*.
vol. 17, USA, 1954.

3. World Council of Churches, *Christian Meeting
Muslims*, Geneva, 1977.
